

## **Tingkat Pemberdayaan Nelayan Melalui Program Desa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara**

[The Empowerment Level of Fishermen Through the Village Program in Bogak Village, Tanjung Tiram District, Batu Bara Regency, North Sumatra]

**Florentina Tamba, Zulkarnain Zulkarnain, Rindi Metalisa**

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau  
Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

Diterima: 13 Juni 2023

### **Abstrak**

Desa Bogak adalah salah satu desa yang berada di wilayah pesisir dan terletak di Kecamatan Tanjung Tiram, lokasi Desa Bogak yang berdekatan dengan daerah pesisir pantai dan pelabuhan besar Tanjung Tiram yang membuat masyarakat di Desa Bogak menggantungkan hidup dengan melaut. Permasalahan yang selalu ada pada nelayan kesulitan mengembangkan usahanya dikarenakan berbagai faktor, diantaranya kurangnya modal, pengetahuan, dan minimnya perhatian pemerintah. Pemerintah harus berperan penting dalam memberdayakan nelayan, dalam memberikan daya maupun memampukan nelayan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis program pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan, tahapan pelaksanaan pemberdayaan nelayan dan tingkat keberdayaan nelayan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mix methods*) dengan jumlah responden sebanyak 43 responden, pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan peran pemerintah Desa Bogak dalam pemberdayaan nelayan dilakukan melalui 3 program yaitu program BUMDes, PAMSIMAS dan program POLMAS. Hasil skala likert menunjukkan program yang dilakukan ini adalah upaya pemerintah desa dalam meningkatkan dan memberdayakan nelayan. Pelaksanaan program ini sudah dapat dikatakan baik dan sudah dapat dimanfaatkan oleh nelayan. Namun masih belum optimal pemerintah desa dalam menjalankan peran untuk membantu permodalan nelayan, meningkatkan keamanan desa. Hal ini perlu peningkatan kinerja dari pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan keberdayaan nelayan.

Kata kunci: peran; pemerintah desa; pemberdayaan; nelayan; program

### **Abstract**

Bogak Village is one of the villages in the coastal area and located in Tanjung Tiram District, the location of Bogak Village is close to the coastal area and the large port of Tanjung Tiram which makes the people in Bogak Village depend on fishing for their living. The problem that always exists is that fishermen have difficulty developing their business due to various factors, including lack of capital, knowledge, and minimal government attention. The government must play an important role in empowering fishermen, in providing power and enabling fishermen. This research aims to describe the types of programs in implementing fishermen empowerment activities, the stages of implementing fishermen empowerment and the level of fishermen empowerment. This research used a descriptive research method with a qualitative and quantitative approach (*mix methods*) with a total of forty-three respondents. The quantitative approach was carried out using a Likert scale. The results of this research are that the role of the Bogak Village government in empowering fishermen is carried out through 3 programs, namely the BUMDes program, PAMSIMAS and the POLMAS program. The Likert scale results show that this program is an effort by the village government to improve and empower fishermen. The implementation of this program can be said to be good and can be utilized by fishermen. However,

the village government is still not optimal in carrying out its role in helping fishermen with capital and improving village security. This requires improving the performance of the government as an effort to increase the empowerment of fishermen.

Keywords: role; village government; empowerment; fishermen; programs

---

### Penulis Korespondensi

Florentina Tamba | florentinatamba8@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Desa Bogak adalah salah satu desa yang berada di wilayah pesisir dan terletak di Kecamatan Tanjung Tiram, lokasi Desa Bogak yang berdekatan dengan daerah pesisir pantai dan pelabuhan besar Tanjung Tiram yang membuat masyarakat di Desa Bogak menggantungkan hidup dengan cara melaut. Penduduk Desa Bogak dengan total keseluruhan penduduk sebanyak 4281 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1292 KK, sebanyak 1762 orang penduduk di Desa Bogak berprofesi sebagai nelayan (BPS 2021). Masyarakat di Desa Bogak masih bergelut dengan kemiskinan. Kondisi pemukiman di Desa Bogak terlihat kurang baik, seperti rumah yang tidak layak huni dan padat penduduk, kualitas air yang buruk serta kondisi alam yang kurang bersahabat. Begitu juga dengan kondisi masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan masih kurang baik (Jeni dan Nugroho, 2020).

Permasalahan yang selalu ada pada nelayan adalah sulitnya keluar dari

kemiskinan karena potensi manusia yang masih rendah, penguasaan teknologi, pasar, dan permodalan yang tidak mendukung. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mereka harus diberdayakan, di mana pemerintah diharapkan mampu membantu mereka berbentuk pemberian daya dan upaya sehingga bisa terbebas dari kemelaratan (Abidin, 2019). Berdasarkan fakta di lapangan kondisi nelayan di Desa Bogak masih belum berkembang ataupun sejahtera dikarenakan beberapa faktor penghambat di antaranya modal yang kurang, dan tingkat pengetahuan nelayan masih rendah. Pemerintah harus berperan penting dalam memberdayakan nelayan, dalam memberikan daya maupun memampukan nelayan, dengan kata lain konsep dari pemberdayaan ini adalah tidak membuat nelayan tergantung ataupun terikat, dan membentuk potensi dalam memajukan kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan (Ramdayanti, Argenti, dan Marsingga, 2021). Program pemberdayaan ini difokuskan untuk mengembangkan desa yang terbelakang

dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan nelayan dengan tujuan memampukan dan memandirikan masyarakat nelayan dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Berdasarkan permasalahan yang selalu ada pada nelayan, pemerintah Desa Bogak telah membentuk program-program yang diharapkan menjadi suatu cara yang dapat membantu dalam memberdayakan nelayan. Adapun program pemberdayaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di mana menurut Effendi (2019) BUMDes diselenggarakan desa untuk desa guna memakmurkan masyarakatnya, yang kemudian dapat mengubah ketertinggalan di wilayah yang ada di Indonesia. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAM-SIMAS) adalah suatu program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah Desa Bogak untuk penyediaan air bersih serta menunjang keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. program ini didasari oleh keadaan daerah Desa Bogak yang kurang baik, masih terdapat tempat tinggal yang tidak layak huni dan wilayah padat penduduk, kondisi kualitas air yang buruk dan tidak layak dikonsumsi dan keadaan alam yang tidak menentu. Sementara kondisi nelayan dengan mata pencaharian melaut masih kurang baik (Jeni dan Nugroho, 2020). Program POLMAS

(polisi masyarakat) yang mana program tersebut dibentuk dengan tujuan demi menjaga kedamaian lingkungan dan ketertiban di kalangan nelayan juga mampu membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah nelayan.

Tujuan pada penelitian adalah (1) mendeskripsikan pelaksanaan jenis-jenis program pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan; (2) mendeskripsikan tahapan pelaksanaan pemberdayaan; dan (3) mendeskripsikan tingkat keberdayaan nelayan.

## **BAHAN DAN METODE**

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2023, di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Desa Bogak. Pemilihan lokasi pada penelitian dibuat dengan sengaja (*purposive*). Peneliti mengambil tempat tersebut karena Desa Bogak memiliki jumlah penduduk yang dominan berprofesi sebagai nelayan tetapi keadaan nelayan masih bergelut dengan kemiskinan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui terkait tingkatan nelayan dengan adanya program yang dilakukan sebagai peran pemerintah dalam pemberdayaan nelayan.

### Penentuan Responden

Seluruh nelayan yang berjumlah 1.762 orang merupakan populasi. Penentuan responden menggunakan metode Slovin dengan tingkat toleransi 15% (Husein umar, 2013) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Error

yang di mana:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{1762}{1 + 1762 (15\%)^2}$$
$$= \frac{1762}{40.645} = 43 \text{ sampel}$$

jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 43 sampel.

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, menggunakan metode Skala Likert, tujuan penggunaan metode ini ialah untuk memperkirakan perilaku, pola pikir dan pandangan mengenai keadaan sosial (Sugiyono, 2013)

Analisis data kuantitatif ini digunakan untuk menjawab tujuan ke 3 yaitu tingkat keberdayaan nelayan. Skala Likert pada penelitian ini adalah skala likert yang telah dimodifikasi menjadi tiga indikator yaitu:

Setuju (S) = 3

Cukup Setuju (CS) = 2

Tidak Setuju (TS) = 1

Ketentuan yang akan dipakai dalam menentukan *range* pada skala likert penelitian ini menggunakan rumus:

$$Range = \frac{SM - SN}{JK}$$

SM = Skor maksimum

SN = Skor minimum

JK = Jumlah kategori

Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberdayaan nelayan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dapat menggunakan rumus:

$$SM = JP \times SMP = 9 \times 3 = 27$$

$$SN = JP \times SNP = 9 \times 1 = 9$$

JP = Jumlah pertanyaan

SMP = Skor maksimum tiap pertanyaan

SNP = Skor minimum tiap pertanyaan

Besar *Range* -nya sebesar:

$$Range = \frac{27 - 9}{3} = 6$$

Dari sembilan (9) pernyataan pada pelaksanaan pemberdayaan nelayan dilakukan pemberian skor (1,2,3). Dari total pokok skala telah dikelompokkan menjadi 3 kategori pada setiap indikator yaitu tidak berdaya, cukup berdaya dan berdaya.

Berdasarkan tabel 1 interval penilaian menunjukkan kategori tidak berdaya jika rentang skor 9-14 artinya pemerintah desa tidak mampu melakukan pemberdayaan terhadap nelayan, kategori cukup berdaya dengan

Tabel 1. Interval penilaian jawaban likert pemberdayaan nelayan

Indeks skor	Keterangan
9 – 14	Tidak Berdaya
15 – 20	Cukup Berdaya
21– 27	Berdaya

rentang skor 15-27 yaitu pemerintah sudah mampu memberikan daya dan berperan namun masih belum optimal dan kategori berdaya dengan rentang skor 21-27 yaitu pemerintah sudah berperan dengan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga proses pemberdayaan berjalan dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Desa Bogak terletak di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 53 Ha berada pada 10 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis Desa Bogak berada di titik koordinat antara 2<sup>o</sup>03'00"-3<sup>o</sup>26'00" LU - 99<sup>o</sup>01'-100<sup>o</sup> BT. Berdasarkan letak geografis dari Desa Bogak memiliki batas daerah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Pahlawan

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Indrayaman

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Bandar Rahmat

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Suka Maju

Penduduk di Desa Bogak sebanyak 4.281 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.292 Kepala Keluarga yang terdiri dari berbagai suku, di mana suku yang paling dominan adalah Suku Melayu Pesisir. Berdasarkan letak geografisnya menjadi faktor utama masyarakat di Desa Bogak menggantungkan hidup dengan melaut.

#### *Pemberdayaan Nelayan*

Pemberdayaan adalah tahapan dengan berbagai aktivitas demi memperkuat kekuasaan untuk memberdayakan individu maupun kelompok yang lemah dilingkungan masyarakat yang merasakan permasalahan kemiskinan (Windasai et al., 2021). Pemberdayaan nelayan menjadikan nelayan tidak akan bergantung kepada setiap bantuan yang diberikan, pemberdayaan di sini diharapkan mampu memandirikan nelayan untuk mengubah hidup nelayan ke arah lebih sejahtera.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui program-program yang telah dibentuk akan terlaksana dengan baik jika masyarakat mampu bekerja

Tabel 2. Program Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Nelayan Desa Bogak

No.	Program pemerintah desa	Tahun terlaksana
1.	BUMDes	2017
2.	PAMSIMAS	2016
3.	POLMAS	2022

Sumber: Laporan Desa Bogak, 2023

sama dan bisa membuat keputusan dengan baik (Vibriyanti, 2014).

#### *Jenis Program Pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan*

Adapun program yang dibuat pemerintah desa dalam kegiatan pemberdayaan nelayan dapat dilihat pada Tabel 2.

Sejauh ini pemerintah Desa Bogak telah berupaya untuk memberdayakan nelayan dengan dibentuknya beberapa program yang dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Program BUMDes dibentuk sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan pada nelayan yaitu dengan membantu dalam memperoleh peminjaman modal nelayan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan peminjaman terdapat nelayan tidak ada patokan jumlah pinjaman dengan kata lain sesuai jumlah yang dibutuhkan nelayan. BUMDes dibentuk dan dikelola desa untuk desa dengan tujuan untuk menyejahterakan penduduk, sehingga daerah yang tertinggal akan lebih maju (Effendi, 2019).

Program PAMSIMAS atau penyediaan air minum bersih dalam sanitasi berbasis masyarakat ialah suatu program yang dibentuk untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat terkhusus nelayan di Desa Bogak. Program ini dibentuk oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat) dan dikelola oleh setiap pemerintah daerah masing-masing. Faktor utama dibentuknya program ini adalah kondisi dari air minum di Desa Bogak yang kurang layak untuk dikonsumsi. Program ini sudah dibentuk 2 unit bangunan di Desa Bogak.

Program polisi masyarakat (POLMAS) adalah kelompok masyarakat yang diharapkan mampu bekerja sama dengan petugas untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman. Program ini baru dibentuk di Desa Bogak setelah adanya pergantian periode pemerintahan, program ini dibuat karena pada pemerintahan sebelumnya keadaan lingkungan tidak tertib dan aman, jadi pemerintah berinisiatif untuk meningkatkan pengawasan kegiatan masyarakat dan nelayan. Program ini

tidak hanya untuk menjaga ketertiban tetapi di Desa Bogak sendiri POLMAS mampu sebagai penampung sekaligus perpanjangan tangan nelayan untuk menyampaikan keluhan maupun permasalahan yang dihadapi para nelayan.

#### *Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan*

Pada tahapan pelaksanaan pemberdayaan nelayan melalui program yang telah dibentuk pada Tabel 2 di atas dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun tahapan dalam Program pemberdayaan nelayan melalui Program BUMDes yaitu tahapan perencanaan, tahapan ini adalah proses untuk menentukan rancangan ataupun tindakan yang dibuat dan disusun dengan tepat. Perencanaan pada program ini dilakukan dengan partisipatif di mana seluruh masyarakat ikut serta dalam menyukseskan program ini. Tahapan pelaksanaan, pada tahapan ini program dibentuk oleh desa dan dikelola oleh masyarakat, pembentukan program ini bertujuan untuk memudahkan maupun membantu para nelayan dalam permodalan untuk usahanya. Di Desa Bogak sendiri program ini dikelola salah satu rumah tangga (masyarakat) yang dirasa mampu menjaga dan mengelola dengan baik. Tahapan evaluasi tahapan ini untuk melihat sejauh mana perkembangan dari program ini. Di Desa

Bogak program ini sangat bermanfaat bagi nelayan di mana mereka terbantu dalam peminjaman modal.

Adapun tahapan dalam Program pemberdayaan nelayan melalui Program PAMSIMAS yaitu tahapan perencanaan, pada tahapan ini adalah sebuah rancangan ataupun gagasan dalam mengatasi permasalahan air minum di Desa Bogak. Tahapan ini bersifat partisipatif artinya seluruh masyarakat terkhusus nelayan dapat memberikan ide ataupun pendapat mengenai pembentukan program ini. Tahapan pelaksanaan, pada tahapan ini pemerintah bersama masyarakat bersama-sama untuk menjaga dan merawat 2 unit PAMSIMAS yang telah dibangun. Tahapan evaluasi, tahapan ini adalah sebagai bahan peninjauan seberapa besar dampak program ini terhadap tingkat pemberdayaan nelayan.

Adapun tahapan dalam Program pemberdayaan nelayan melalui Program POLMAS yaitu tahapan perencanaan, tahapan ini telah diadakan musyawarah antara pemerintah dan seluruh masyarakat mengenai pembentukan program ini. Tahapan pelaksanaan, pada tahapan ini pemerintah telah mengamanatkan salah satu dari perangkat desa untuk sebagai POLMAS. Diharapkan terjalinnya kerja sama yang baik antara petugas dengan masyarakat terkhusus para nelayan untuk keamanan lingkungan

desa. Tahapan evaluasi, tahapan ini sebagai penilaian terhadap tanggung jawab pemerintah terhadap pembentukan program ini. Program ini sudah cukup mampu menjaga kondisi di desa dilihat dari kondisi di Desa yang sudah cukup tertib, aman dan terjalannya komunikasi yang baik antara nelayan dan pemerintah dengan adanya POLMAS, tetapi perlu keseriusan lebih dari pemerintah baik penambahan petugas dan pemberian bekal petugas.

#### *Tingkat Keberdayaan Nelayan*

Berikut dapat dilihat pada Tabel 3 tingkat keberdayaan nelayan setelah dilaksanakan program pemberdayaan.

Hasil analisis yang telah dilakukan dengan Skala Likert untuk mengetahui tingkat keberdayaan nelayan telah disajikan dalam Tabel 3 dan Tabel 4. Di mana Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan nelayan sudah dapat dikatakan cukup berdaya. Hasil analisis terhadap Responden pada kategori cukup berdaya sebanyak 41 orang dengan persentase 95,3% dan

berdaya sebanyak 2 orang dengan persentase 4,65%. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adanya kemudahan pada nelayan dalam peminjaman modal namun hal ini belum sepenuhnya mampu membantu nelayan dikarenakan program BUMDes tidak dijalankan dengan optimal dikarenakan Kepengurusan BUMDes yang dibebankan pada satu kepala keluarga mengakibatkan program ini tidak ada peningkatan atau kegiatan lain. Untuk program PAMSIMAS sendiri sudah dikatakan bermanfaat bagi penduduk di Desa Bogak terkhusus para nelayan. Manfaat dari program ini ialah teratasinya masalah *stunting* (masalah gizi akibat kekurangan asupan), memperoleh air bersih yang layak untuk dikonsumsi di kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang telah dibentuk oleh pemerintah di Desa Bogak juga membentuk suatu program yang berfungsi untuk menjaga dan menciptakan keadaan lingkungan dengan aman dan tenteram yaitu program POLMAS atau

Tabel 3. Tingkat keberdayaan nelayan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

Kategori	Indeks skor	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tidak berdaya	9-14		0
Cukup berdaya	15-20	41	95,34
Berdaya	21-27	2	4,65
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100</b>

Tabel 4. Perubahan setelah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

Jenis Program	Perubahan
BUMDes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempermudah nelayan dalam melakukan peminjaman modal usaha</li> <li>2. Bangunan BUMDes dapat dijadikan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal nelayan</li> <li>3. Dengan adanya bangunan BUMDes ini para nelayan dapat berkumpul ataupun duduk beristirahat sambil menjalin sosialisasi sesama dan Meningkatnya hubungan sosialisasi sesama nelayan</li> </ol>
PAMSIMAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan program ini nelayan sudah mendapatkan kebutuhan air bersih yang layak dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya</li> <li>2. Program PAMSIMAS ini telah dapat mengurangi risiko <i>stunting</i> (kekurangan asupan gizi) pada kehidupan masyarakat terkhusus di lingkungan nelayan.</li> </ol>
POLMAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan program ini walaupun masih terhitung baru ada di Desa Bogak sudah cukup mampu menjaga keamanan di kegiatan nelayan maupun di lingkungan</li> <li>2. Program ini juga tidak hanya sebagai menjaga dan keamanan namun dengan adanya POLMAS ini para nelayan merasa dengan mudah dalam menyampaikan keluhannya.</li> </ol>

polisi masyarakat. Para nelayan mengatakan bahwasanya program ini sangat berguna bagi kehidupan mereka. Di mana adanya perubahan suasana ataupun kondisi di desa salah satu perubahannya yaitu berkurangnya masalah kekerasan ataupun tingkat pencurian dan berkurangnya perselisihan di antara para nelayan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang telah dibentuk yang pertama yaitu untuk mempercepat pengembangan program BUMDes supaya tidak hanya berfungsi untuk peminjaman modal nelayan, pemerintah Desa Bogak harus membuat kebijakan ataupun menyusun program ini dengan baik sehingga sistem pengelolaannya bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana dengan BUMDes di desa-desa lain yang telah menyusun

kepengurusan dengan baik sehingga program ini terlaksana tertata dengan baik. Kedua yaitu untuk menjaga Program PAMSIMAS ini agar tetap berjalan diharapkan pemerintah desa dituntut harus mengawasi secara langsung dan mengarahkan seluruh masyarakat untuk saling bekerja sama merawat unit PAMSIMAS ini. Ketiga yaitu untuk memaksimalkan kinerja dari Program POLMAS ini pemerintah diharapkan memberikan pembekalan lebih banyak kepada petugas dan perlunya pembuatan kebijakan agar program ini mempertegas keberadaan program ini. Keempat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dibentuk oleh pemerintah, nelayan diharapkan dapat bekerja sama dengan

baik untuk sama-sama mencapai tujuan pemberdayaan nelayan itu sendiri.

## **Pembahasan**

### *Jenis Program Pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan*

Upaya pemerintah Desa Bogak dalam memberdayakan masyarakat terkhusus nelayan yang dilakukan adalah dengan membuat program. Program ini diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, masalah kesehatan dan keamanan nelayan di Desa Bogak. Adapun program yang dibuat pemerintah desa dalam kegiatan pemberdayaan nelayan dapat dilihat pada Tabel 3, Yang pertama yaitu program BUMDes dibentuk sejak tahun 2017, pembentukan program ini untuk membantu nelayan untuk mengembangkan usahanya dengan mempermudah peminjaman modal. Program PAMSIMAS dibentuk sejak tahun 2016, pembentukan program ini didasari oleh keadaan air bersih di Desa Bogak yang tidak layak untuk dikonsumsi. Program POLMAS dibentuk sejak tahun 2022 tepatnya pada bulan Desember 2022, pembentukan program ini dikarenakan kondisi di Desa Bogak yang tidak tertib, masyarakat hidup tanpa aturan, sehingga pemerintah berinisiatif untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Menurut Sahyana (2019) Peran berarti kepribadian seseorang dalam keadaan maupun suatu peristiwa yang

tidak tentu, yang mana perbuatan tersebut adalah kegiatan yang sangat dinantikan dan didambakan untuk dilakukan oleh seseorang yang telah berkedudukan atau yang telah memiliki jabatan dan diakui pada tatanan masyarakat. Sama halnya dengan pemerintah, dalam bidang pemerintah juga mempunyai perannya tersendiri. Berdasarkan data statistik Desa Bogak, masyarakat di Desa Bogak mayoritas adalah nelayan dikarenakan lokasi desa merupakan wilayah pesisir dan mempunyai potensi perikanan yang besar. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberdayakan masyarakat Desa Bogak.

Upaya Pemberdayaan nelayan adalah sebagai usaha dasar yang sudah direncanakan, teratur, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bersifat keberlanjutan (Immanuel, 2015). Dalam hal memberdayakan kita luput dari peran dan tanggung jawab pemerintah terutama pemerintah desa. Untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Desa Bogak harus melakukannya dengan membuat perencanaan, pelaksanaan dan tahapan evaluasi dari setiap program yang telah dibuat. Sejauh ini pemerintah Desa Bogak telah berupaya melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan upaya memberdayakan nelayan.

### *Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan*

Adapun tahapan dalam program pemberdayaan melalui pengadaan BUMDes, PAMSIMAS DAN POLMAS ini terdiri dari 3 tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

#### a. Program BUMDes

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 pada pasal 213 ayat 1 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa bisa membentuk BUMDes jika sebanding dengan keperluan Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu program yang dibentuk penduduk dan pemerintahan desa untuk memperkokoh perekonomian dan keuangan desa. BUMDes diatur dan dikembangkan dari desa untuk desa sebagai upaya memakmurkan masyarakatnya, maka dari itu suatu desa akan berkembang dan semakin maju (Effendi 2019). Pada program BUMDes, tahapan perencanaan dilakukan dengan sistem perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa dengan mengalokasikan anggaran dana. Pada hasil penelitian tahapan perencanaan di Desa Bogak belum dilakukan secara terstruktur. Tahapan pelaksanaan, program ini telah berhasil dijalankan dengan membangun bangunan BUMDes. Asti

dan Cholid (2018) pada penelitiannya menjelaskan bahwa suatu upaya akan berhasil jika adanya campur tangan dari pemerintah itu sendiri. Pelaksanaan yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan program ini tidak disusun dengan baik mengenai pengelolaannya, sehingga program ini tidak berjalan semestinya. Tahapan evaluasi, pemerintah desa memang sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan membangun BUMDes namun pada kenyataannya pemerintah Desa Bogak kurang memperhatikan pelaksanaan program ini. Hasil penelitian (Rahmayanti et al., 2019) menunjukkan bahwa perencanaan BUMDes sudah terlaksana ditandai dengan adanya dokumen yang telah disusun dengan baik. Hal ini sejalan juga dengan penelitian Lanna *et al.*, (2022) yaitu keberadaan BUMDes masih kurang mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan usaha nelayan dikarenakan susunan dari program yang belum tertata.

#### b. Program PAMSIMAS

Menurut Chaerunnissa (2014) Program PAMSIMAS adalah suatu program dari Pemerintah guna mengembangkan dan mengatasi angka kemiskinan di pedesaan de-

ngan cara perubahan sistem pelayanan juga pemberian fasilitas air minum dan sanitasi dan juga upaya meningkatkan etika dan perubahan pola hidup bersih dan sehat dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Rendahnya akses terhadap pemanfaatan air bersih menjadi faktor utama pembentukan program ini. Pada program PAM-SIMAS tahapan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah penyusunan proposal untuk pembentukan program ini, dan hal ini dilakukan dengan melibatkan langsung masyarakat. Nengsi (2018) berpendapat jika pemerintah desa memberikan dukungan terhadap masyarakat maka desa tersebut akan dengan mudah untuk memberikan daya. Tahapan pelaksanaan program PAMSIMAS telah dilaksanakan dan telah berhasil disalurkan ke setiap rumah masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Ariya *et al.*, (2022) yaitu pembentukan program ini sudah mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih bersih tetapi masih ada beberapa dari masyarakat yang kurang menerima atau sulit mengubah kebiasaannya. Tahapan evaluasi pada program ini sudah dapat dikatakan baik karena seluruh masyarakat merasakan manfaat dari

penyiapan dan pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kebijakan dari pemerintah Desa Bogak terhadap program ini sangat tepat. Namun masih kurang maksimal dikarenakan pengawasan tidak ada dilakukan untuk mengetahui apakah program ini terkelola dengan baik atau tidak.

c. Program POLMAS

Perpolisian Masyarakat atau POLMAS adalah suatu pola pengawasan yang memfokuskan dengan adanya kerja sama antara petugas dengan penduduk desa dalam menanggulangi setiap permasalahan sosial yang dirasa dapat mengancam ketertiban dan keamanan penduduk setempat (Alim 2019). Program POLMAS adalah sebuah program baru yang berada di Desa Bogak setelah pergantian pemerintahan tahun 2022 yang lalu. Pengadaan program ini dikarenakan pada pemerintahan sebelumnya kondisi lingkungan di Desa Bogak yang kurang tertib. Pada program POLMAS tahapan perencanaan dilakukan dengan mengadakan musyawarah terkait peningkatan keamanan terkhusus pada kegiatan nelayan. Ramadhan *et al.*, (2021) dalam penelitiannya mengatakan program POLMAS ini adalah suatu upaya untuk menciptakan suasana

yang aman bagi masyarakat. Pada tahapan ini telah dibekali untuk mengawasi dan memelihara ketertiban sesama masyarakat terkhusus para nelayan. Tahapan pelaksanaan sudah berjalan cukup bagus, pemerintah telah dapat membekali salah satu masyarakat yang dianggap mampu dalam menjalankan kegiatan ini. Rifai (2018) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa adanya program ini berfungsi untuk membentuk keadaan yang aman di lingkungan masyarakat itu sendiri. Tahapan evaluasi pada program Polmas ini sudah dapat dikatakan baik dikarenakan nelayan lebih mudah menyampaikan berbagai keluhan dan menjaga keamanan dalam kegiatan nelayan. Namun pemerintah Desa Bogak kurang membekali POLMAS tentang tugas yang harus dijalankan, sehingga para nelayan masih kurang puas dengan keberadaannya, dalam hal ini pemerintah desa diharapkan menyiapkan pembekalan POLMAS yang telah ditunjuk baik dari segi pengetahuan dan kesigapan.

#### *Tingkat Keberdayaan Nelayan*

Upaya pemerintah Desa Bogak diharapkan telah mampu membantu nelayan dalam keberdayaannya. Dapat

dilihat pada Tabel 3 mengenai tingkat keberdayaan nelayan setelah dibuat program pemberdayaan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, tingkat keberdayaan nelayan di Desa Bogak sudah berada pada kategori cukup berdaya.

Sitompul (2015) mengatakan pemberdayaan nelayan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa nelayan sudah merasakan kemudahan dalam peminjaman modal usaha karena pembentukan program BUMDes, berkurangnya stunting dan dapat mengonsumsi air bersih karena program PAMSIMAS, semakin terjalannya sosialisasi sesama nelayan, dimudahkan nelayan dalam menyampaikan keluhan kesah maupun masalah yang dihadapi dan adanya perubahan kondisi lingkungan masyarakat karena dibuatnya program POLMAS. Namun disisi lain pemerintah Desa Bogak masih dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaan program yang telah disusun dan dibentuk. Hal ini diketahui dari hasil wawancara di lapangan yaitu pemerintah desa merasa untuk saat ini sudah tidak terlalu serius dalam keberadaan program tersebut. Diketahui bahwa Program BUMDes tidak tertata dengan baik kepengurusannya sehingga tujuan pembed-

tukan program ini tidak seluruhnya tercapai. Program PAMSIMAS juga kurang pengawasan pemerintah tentang perkembangan program ini dan perlunya pengarahan kepada masyarakat terutama pada nelayan untuk turut berpartisipasi untuk merawat dan menjaga kebersihan. Program POLMAS yang masih kurang optimal dikarenakan program ini masih termasuk program baru di Desa Bogak sehingga untuk kinerja dari program ini masih tidak terlalu banyak. Pangke *et al.*, (2019) mengatakan bahwa pemerintah dikatakan telah berperan dengan baik dan telah menjalankan tugas dilihat dari anggaran dana yang telah digunakan sesuai kebutuhan desa dengan kata lain jika pemerintah menjalankan perannya dengan baik maka dalam pemberdayaan akan terlaksana dengan optimal. Dengan demikian program-program yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa Bogak dituntut supaya lebih bekerja keras dan lebih serius lagi untuk mengelola dengan baik program-program ini dan adanya program baru yang khusus dibentuk untuk memberdayakan nelayan supaya tingkat ketercapaian keberdayaan nelayan melalui program Desa dikatakan layak dan sudah optimal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah

Desa sesuai dengan perannya ialah pemerintah telah berupaya dalam mengatasi permasalahan nelayan yaitu dengan dibentuknya beberapa program. Adanya program ini adalah upaya pemerintah desa untuk meningkatkan dan memberdayakan nelayan di antaranya program BUMDes untuk membantu mempermudah dalam permukiman nelayan dalam mengembangkan usahanya, program PAMSIMAS adalah program pemberdayaan melalui pengadaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi dan untuk mencegah terjadinya stunting. Program POLMAS bermanfaat untuk menjaga keamanan lingkungan desa Bogak dan juga keberadaan program ini sangat membantu nelayan untuk menyampaikan berbagai permasalahan maupun keluhan yang sedang dihadapi. Pelaksanaan program ini sudah dapat dikatakan baik dan sudah dapat dimanfaatkan oleh nelayan, namun belum optimal. Pada tahapan pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Bogak dilakukan terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Keberdayaan nelayan di Desa Bogak sudah dapat dikatakan cukup berdaya, namun nelayan merasa pemerintah masih kurang serius dalam mengembangkan program tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas pemerintah desa diharapkan lebih

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya dengan cara lebih aktif untuk turun tangan langsung dalam melihat kondisi para nelayan.

### PERSANTUNAN

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram beserta masyarakatnya yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data melalui wawancara kepada nelayan dan pegawai dibidang pemerintah desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin As, Zaenal. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang." *Jurnal Caraka Prabhu* 1(2):84–122. doi: 10.36859/jcp.v1i2.95.
- Alim, Fitia Y. 2019. "Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratif* 13(1):32–51.
- Ariya, Osep Hendra, Kiki Endah, dan Regi Refian Garis. 2022. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Bojongsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran." *abdimas galuh* 2(1):2529–40.
- Asti, Asti, dan Irfan Cholid. 2018. "Persepsi Dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan Bumdes di Kecamatan Kendawangan." *Jurnal Agribisnis Indonesia* 6(1):1. doi: 10.29244/jai.2018.6.1.1-14.
- BPS. 2021. *Data Kependudukan*. Batu Bara (ID).
- Chaerunnissa, Chika. 2014. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebes." *Politika* 5(2).
- Effendi, Ajisman. 2019. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara*.
- Husein umar. 2013. *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. ED 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Immanuel, Florentinus Christian. 2015. "Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara." *e-journal ilmu Pemerintahan* 3(2):03.
- Jeni, Janet, dan Firman Nugroho. 2020. "Pengaruh Curahan Jam Kerja

- Pada Rumah Tangga Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir* 1(3):63–67.
- Lanna Sar, Rkt, Izki Putri Ramadhani, M. Darma Marpaung, dan Muhammad Al-Amin. 2022. “Analisis Hambatan dalam Pengembangan BUMDES (Studi Desa Guntung Kabupaten Batubara).” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2(2):129–38.
- Nengsi, Sri. 2018. “Analisis Keberlangsungan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca PAMSIMAS) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar.” *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4(1):33. doi: 10.35329/jkesmas.v4i1.233.
- Pangke, Roland A., Anderson G. Kumenaung, dan Josep Bintang Kalangi. 2019. “Efektivitas Peranan Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sitaro.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19(3):1–11.
- Rahmayanti, Krisna Puji, Dhian Kusumawardhani, dan Afiati Indri Wardani. 2019. “Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDES di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat).” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 7(1):67–77. doi: 10.30656/sawala.v7i1.846.
- Ramadhan, Rinaldi, Mahmud Mulyadi, dan Marzuki Marzuki. 2021. “Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai).” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3(1):274–91.
- Ramdayanti, Elvira, Gilli Argenti, dan Prilla Marsingga. 2021. “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6(2):194–201. doi: 10.33701/jipsk.v6i2.1895.
- Rifai, Eddy. 2019. “Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung.” *Cepalo* 2(1):43. doi: 10.25041/cepalo.v2no1.1761.
- Sahyana, Yana. 2019. “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat).” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 9(2):157–81. doi:

- 10.33701/jt.v8i2.618.
- Sitompul, Nixson Rauven. 2015. "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Silo Baru Melalui Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (Pdpt)." *Ilmu Administrasi* 12(2):267 – 288.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Vibriyanti, Dshinta. 2014. "Kondisi sosial ekonomi nelayan tangkap Kota Tegal Jawa Tengah." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 9(1):45–58.
- Windasai, Mohammad Mas'ud Said, dan Hayat. 2021. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)." *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)* 2(3):797.